

**PENGARUH PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM) DAN NILAI
TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK**
(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung tahun 2010-2015)

EFFECT OF LUXURY SALES TAX AND EXCHANGE RATE TO TAX REVENUE
(*Study of Tax Service Office Madya Bandung 2010-2015*)

Nita Karlina¹, Dudi Pratomo², Annisa Nurbaiti³

^{1, 2, 3} Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹ nitakarlina554@yahoo.com@yahoo.com, ² dudipratomo@yahoo.com, ³ annisa.nurbaiti@yahoo.com

Abstrak

Pajak sebagai bagian dari sumber penerimaan negara yang mendominasi penerimaan Negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang memiliki andil dan peranan terhadap penerimaan pajak Negara di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana di dalamnya terkait Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang memiliki tarif yang relatif tinggi. Selain dengan banyaknya objek pajak dan menetapkan tarif pajak yang relatif tinggi, hal tersebut tidak luput dari faktor eksternal dimana adanya kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi penerimaan perpajakan salah satunya nilai tukar rupiah yang mempengaruhi penerimaan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung periode 2010-2015.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif. Sampel yang dipilih melalui *judgement sampling* dan diperoleh 72 sampel yang dimana 5 sampel *outlier* sehingga data yang digunakan sebanyak 67. Data yang digunakan adalah data sekunder dari realisasi penerimaan pajak di KPP Madya Bandung dan kurs yang telah diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda menggunakan aplikasi SPSS ver.20

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara PPnBM dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak tahun 2010-2015 di KPP Madya Bandung. Sedangkan hasil analisis secara parsial didapat hasil bahwa PPnBM tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan atas barang Mewah (PPnBM), nilai tukar rupiah, penerimaan pajak

Abstract

Taxes as part of a revenue source to dominate state revenues are used for the welfare of the people. One type of tax that dominates is the value added tax which included a sales of luxury goods which have relatively high rates. Beside a lot of object at a high tariff, its not independent from external factors where the policies that affect the tax revenue is one of exchange rate and that affect tax revenue.

This study aimed to analyze the influence of sales tax on luxury goods and the exchange rate of tax revenue in the tax office Madya Bandung years 2010-2015.

This type of research is causal comparative. Samples were selected through judgement sampling and obtained 72 samples however 5 sample is outlier and obtained 67 samples over years of research. The data used are secondary data from the realisation tax revenue in tax office Madya Bandung and exchange rate from Ministry of Finance. The analysis method is double regression method with fixed effect using SPSS version.20.

The results luxury sales tax and exchange rate simultaneously on the tax revenue on year 2010-2015 on tax office Madya Bandung .and then Partial analysis variable luxury sales tax has no effect significantly with tax revenue while exchange rate has effect significantly to tax revenue

Keywords: Luxury Sales Tax, Exchange Rate, Tax Revenue.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan suatu sumber alternatif pembiayaan pembangunan yang diterapkan pada hampir seluruh negara dunia, Resmi [11]. Sebagaimana kondisi tersebut, pendapatan negara di Indonesia juga didominasi oleh penerimaan pajak dibandingkan dari penerimaan negara bukan pajak.

Karena banyaknya peran pajak, maka pajak senantiasa menjadi sumber penerimaan dalam negeri yang semakin diandalkan dalam membiayai pembangunan negara. Oleh karena itu, pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjaga kesesuaian visi dan misi serta mengamankan penerimaan negara terbelang sering dalam melakukan reformasi, khususnya undang-undang dan ketetapan-ketetapan serta sistem administrasi perpajakan maupun modernisasi sistem pengendaliannya..

Menurut Nasikhudin [8], keberhasilan pajak sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang negatif biasanya berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Atau dalam kata lain, terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan penerimaan pajak. Namun, menurut Wibowo [20], penerimaan perpajakan sangat bergantung pada strategi-strategi internal yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sejauh ini indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ialah Produk Domestik Bruto (PDB). Dimana PDB ini adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang diproduksi suatu negara pada periode tertentu. PDB ini merupakan penjumlahan dari konsumsi, investasi, ekspor, netto yang terjadi di suatu negara, serta pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pertumbuhan PDB yang positif seharusnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak dan berlaku sebaliknya.

Namun, pada tahun 2015, penerimaan perpajakan selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan dari realisasi yang telah ditetapkan (www.pajak.go.id). Begitu pula yang terjadi pada realisasi penerimaan pajak tahun 2015. Menurut Yustinus Prastowo [22], selaku Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)*, memperkirakan penerimaan pajak tahun 2015 maksimal hanya mencapai 77% hal ini seiring dengan penerimaan pajak hingga bulan Agustus 2015 yang baru hanya mencapai 63,13% dari target penerimaan. Menurut Yustinus Prastowo [22], Sejauh ini penerimaan pajak di Indonesia masih didominasi oleh pajak barang dan jasa (PPN dan PPnBM) dibandingkan dengan pajak pendapatan, profit dan *capital gains* (PPH). Namun meskipun PPN mendominasi penerimaan pajak namun performa menurut data realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 12,15% atau sebesar Rp.85,427 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp.90,310 triliun. Demikian pula dengan PPnBM yang mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 24,46% atau sebesar Rp.2,948 triliun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014 yaitu sebesar Rp.3,903 triliun (www.pajak.go.id). Hal ini tidak terlepas dari pengaruh eksternal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah yang sampai pada bulan agustus ini menembus angka Rp.13.500 rupiah per US\$1.

Daya beli masyarakat yang masih tergerus akibat pelemahan nilai tukar rupiah mengakibatkan mengurangi konsumsinya sehingga pada akhirnya membuat pengusaha juga mengurangi belanja produksinya. Sehingga, kondisi ini berimbas pada penerimaan PPN maupun PPnBM.

Penurunan terbesar PPnBM dalam negeri dipicu oleh kebijakan Pemerintah yang menghapus beberapa barang dari daftar barang mewah yang wajib dikenakan PPnBM dengan mengeluarkan peraturan PMK nomor 106/PMK.010/2015. Sehingga dari fenomena tersebut bertolak belakang dengan teori yang dinyatakan oleh Wibowo [20], bahwa penerimaan pajak hanya bergantung dari strategi yang telah direncanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ini artinya bahwa penerimaan pajak sejauh ini meskipun dengan strategi yang sudah matang untuk dilaksanakan, namun adanya faktor eksternal diluar kuasa Direktorat jenderal Pajak (DJP) yang akan mempengaruhi penerimaan pajak.

Sejauh ini perkiraan melemahnya nilai tukar rupiah disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor domestik. Faktor eksternal disebabkan oleh perbaikan ekonomi Amerika Serikat. Pada tahun 2008, *The Fed*, Amerika Serikat menerapkan kebijakan *Quantitative Easing* (QE) yaitu menyuntikan dana ke seluruh dunia dengan cara pembelian obligasi jangka panjang dikarenakan terjadinya krisis ekonomi dari pasar finansial. Sejak ekonomi negeri paman Sam membaik, *The Fed* memberhentikan stimulus (*tapering off*) pada awal 2014.

Lebih dari itu, tersebar pula rencana bahwa *The Fed* akan menaikkan suku bunga pada tahun 2015. Akibatnya, dana segar dari negara yang semula disimpan di luar Amerika Serikat kembali ke asalnya karena kebijakan pemotongan dana stimulus dan rencana kenaikan suku bunga *The Fed*. Untuk itu, maka negara-negara berkembang seperti Indonesia yang mendapat dana investasi dari Amerika Serikat harus kehilangan dana tersebut karena penarikan modal oleh investor secara besar-besaran. Oleh karenanya, jumlah dolar di Indonesia semakin menipis yang menyebabkan rupiah terus terkoreksi dari nilai fundamentalnya. Setelah itu, *the fed* mengeluarkan kebijakan *tapering off* yang menghentikan stimulus dana untuk negara berkembang membuat modal yang ada di Indonesia akhirnya ditarik kembali ke Amerika Serikat atau disebut dengan *capital flight*. Dampaknya, arus modal yang keluar lebih tinggi menyebabkan permintaan modal di pasar uang meningkat. Sehingga pemerintah mengambil langkah untuk pembangunan di pasar

uang melalui pinjaman modal dan menyebabkan hutang Indonesia meningkat dari 129.736 juta USD di tahun 2014 menjadi 135.724 juta USD di tahun 2015. (<http://febui.com>).

Menurut Arifin [1], Neraca perdagangan Indonesia juga memberikan pengaruh terhadap nilai tukar mata uang rupiah. Kegiatan ekspor dan impor berperan dalam penentuan nilai tukar mata uang. Seperti diketahui, neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2015 mengalami surplus. Saat ini, kegiatan ekspor sebesar 11.408 juta USD lebih tinggi dari impor yang turun ke angka 10.076 juta USD. Walaupun kondisi neraca perdagangan Indonesia sedang surplus, hal ini terjadi karena penurunan ekspor yang lebih rendah dari penurunan impor. Penurunan ekspor ini menjadi salah satu faktor rupiah terdepresiasi dan berakibat pada transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dan menyebabkan penurunan penerimaan pajak.

2. Dasar teori dan metodologi

2.1 Dasar teori

2.1.1. Teori Pajak

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH [10] definisi atau pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Menurut Undang-undang PPN No 42 Tahun 2009 [17], pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena pajak yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha aau pekerjaannya, ataupun impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Dengan demikian, berbeda dengan PPN, PPnBM yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut,tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPnBM yang dipungut. Atau dengan kata lain, PPnBM ini hanya dipungut satu kali saja.

2.1.3. Nilai Tukar Rupiah

Menurut Murni [12], nilai tukar (*exchange rate*) atau disebut juga kurs valuta asing (*foreign exchange rate*) adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Menurut Sukirno [15], kurs valuta asing didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tukar rupiah adalah rasio pertukaran anatara sejumlah mata uang domestik (rupiah) dengan satu unit mata uang asing.

2.1.4. Penerimaan Pajak

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia, (kemenkeu.go.id) menyatakan bahwa:“penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan yang utama dalam APBN. Selama lima tahun terakhir penerimaan perpajakan rata-rata sekitar 80% dari total penerimaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Peran pajak tersebut akan semakin besar untuk masa yang akan datang karena pemerintah ingin mengurangi hutang dalam membiayai APBN. Karena peranan pajak semakin penting, maka penerimaan perpajakan membutuhkan sistem pengelolaan yang semakin baik sehingga penerimaan perpajakan semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.”

Penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), sedangkan penerimaan yaitu suatu kondisi perbuatan untuk menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.5. Pengaruh Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Waluyo [19] PPnBM sejauh ini berkontribusi banyak dalam penerimaan pajak dikarenakan tingginya tarif yang dibebankan dan jumlah konsumsi masyarakat akan barang mewah cukup meningkat seiring jalannya waktu. Menurut Yustinus Prastowo [22].sejauh ini penerimaan pajak didominasi oleh pajak barang dan jasa (PPN dan PPnBM) dibandingkan dengan pajak pendapatan, profit dan *capital gains* (PPh),

Pada negara berkembang, pemerintah seringkali memberlakukan kebijakan pembatasan impor guna melindungi produk domestik. Kebijakan pembatasan impor dapat dilakukan dengan membebaskan pajak penjualan yang tinggi bagi produk impor, sedangkan untuk produk domestik tidak dibebankan pajak atau dibebankan pajak dengan tarif rendah. Menurut peneliti, perbedaan pembebanan pajak penjualan menyebabkan pajak penjualan lebih banyak dikumpulkan dari kegiatan impor dibandingkan dari kegiatan domestik, sehingga akan mempengaruhi total penerimaan pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian

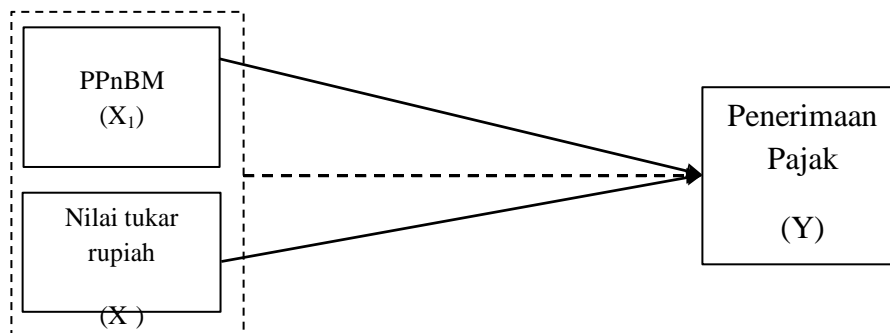
Damayanti [3], dengan kondisi masyarakat yang cenderung konsumtif pajak penjualan barang mewah sejauh ini mendominasi penerimaan pajak dan menjadikan penerimaan PPnBM meningkat selama empat tahun terakhir.

2.1.6. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak

Nilai tukar adalah nilai mata uang suatu negara diukur dari nilai satu unit mata uang terhadap mata uang negara lain. Apabila kondisi ekonomi suatu negara mengalami perubahan, maka biasanya diikuti oleh perubahan nilai tukar secara substansional. Masalah mata uang muncul pada saat suatu negara mengadakan transaksi dengan negara lain, di mana masing-masing negara menggunakan mata uang yang berbeda. Pengaruh nilai tukar ini secara garis besar akan berpengaruh ke pergerakan ekonomi di negara tersebut dan berimbas pada penerimaan negara terbesar salah satunya yaitu penerimaan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tanzi [16], kebijakan ekonomi di beberapa negara berkembang yang telah diobservasi sering menunjukkan adanya hubungan antara penerimaan pajak suatu negara dan tingkat riil nilai tukar resmi.

Pada negara berkembang, pemerintah seringkali memberlakukan pembatasan impor namun sejauh ini pajak penjualan lebih banyak dikumpulkan dari kegiatan impor dibandingkan dari kegiatan domestik, sehingga perubahan nilai tukar riil yang terjadi juga akan mempengaruhi total penerimaan pajak penjualan baik PPN maupun PPnBM. Jika nilai tukar riil mengalami overvaluasi, pengumpulan pajak yang berasal dari total pajak penjualan dan cukai dalam bentuk riil akan mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan overvaluasi nilai tukar akan menyebabkan turunnya nilai domestik dari produk impor tersebut Tanzi [16]. Begitupula sebaliknya, jika nilai tukar riil dalam kondisi *overvaluation* (nilai mata uang domestik per unit mata uang asing meningkat) namun, dengan asumsi neraca pembayaran suatu negara dalam kondisi surplus, maka penerimaan pajak akan meningkat. Menurut peneliti, sejauh ini melihat kondisi ekonomi pada tahun 2015 dimana Indonesia banyak melakukan transaksi dengan negara luar, maka nilai tukar rupiah sebagai mediator perdagangan akan mempengaruhi penerimaan negara yang tidak terlepas dari penerimaan pajak yang mendominasi penerimaan negara selama beberapa tahun terakhir. Secara sistematis kerangka pemikiran dapat dijabarkan dengan gambar 1 berikut :

Gambar 1 kerangka pemikiran



Keterangan $--\blacktriangleright$: Secara Simultan
 \blacktriangleright : Secara Parsial

2.2 Metodologi penelitian

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung tahun 2010-2015. Sampel pada penelitian ini diperoleh dengan metode *judgement sampling*. Adapun kriteria yang menjadi dasar pemilihan sampel adalah data realisasi penerimaan pajak di KPP Madya Bandung tahun 2010-2015 data nilai tukar rupiah yang dikeluarkan oleh kurs Menteri Keuangan setiap minggunya lalu di rata-ratakan menjadi kurs perbulan sehingga diperoleh 72 sampel namun 5 sampel outlier sehingga sampel yang digunakan sebanyak 67.

Menurut Sekaran [12] data sekunder adalah data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Beberapa sumber data sekunder antara lain buletin statistik, publikasi pemerintah, informasi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dari dalam atau luar perusahaan, data yang tersedia dari penelitian sebelumnya, studi kasus dan dokumen perpustakaan, data online, situs web dan internet. Pengolahan data dalam penelitian ini adalah regresi berganda hal ini bertujuan melihat pengaruh hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a_1 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

- Y = Perimaan Pajak
- A = Konstanta persamaan regresi
- b₁, b₂, = Koefisien regresi
- X₁ = PPnBM
- X₂ = Nilai tukar rupiah
- e = Kesalahan estimasi standar

3. Pembahasan

3.1 Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis statistik deskriptif untuk menjawab perumusan masalah deskriptif. Berikut ini adalah hasil penelitian dari analisis statistik deskriptif yang disajikan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1 statistik deskriptif

	PPnBM	Nilai Tukar Rupiah	Penerimaan Pajak
Mean	740.417.764	10.484,75	546.634.538.042
Maximum	2.491.850.391	14.315,80	1.222.392.913.304
Minimum	-	8.524,20	56.454.238.778
Standar Deviasi	233.188.395	266,38	56.642.028.536
Observartions	72	72	72

Sumber: Data yang telah diolah, 2016

Berdasarkan tabel 1 hasil variabel PPnBM yang diukur menggunakan skala nominal pada realisasi penerimaan pajak di KPP Madya Bandung memiliki nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 2.491.850.391, serta rata-rata (*mean*) sebesar 740.417.764 dan standar deviasi 233.188.395. Hasil variabel nilai tukar rupiah dari kurs Menteri Keuangan perminggu yang dirata-ratakan memiliki nilai minimum sebesar 8.524,20, nilai maksimum sebesar 14.315,80 , serta rata-rata (*mean*) sebesar 10.484,75 dan standar deviasi sebesar 266,38. Hasil variabel penerimaan pajak yang dikeluarkan dari realisasi taunan Madya bandung tahun 2010-2015 memiliki nilai minimum sebesar 56.454.238.778, nilai maksimum sebesar 1.222.392.913.304, serta rata-rata (*mean*) sebesar 546.634.538.042 dan standar deviasi 56.642.028.536.

3.2 Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal.

Tabel 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		67
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,18029990
Most Extreme Differences	Absolute	,121
	Positive	,121
	Negative	-,074
Kolmogorov-Smirnov Z		,993
Asymp. Sig. (2-tailed)		,278

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Analisis kenormalan berdasarkan metode Kolmogorov-Smirnov mensyaratkan kurva normal apabila nilai Asymp. Sig. berada di atas batas maximum error, yaitu 0,05. Adapun dalam analisis regresi, yang diuji

kenormalan adalah residual atau variabel gangguan yang bersifat stokastik acak, berdasarkan tabel di atas, karena nilai Asymp. Sig nya 0,278 maka disimpulkan bahwa data normal.

3.2.2 Uji Multikolenearitas

Multikolinieritas merupakan sesuatu dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi tinggi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factors (VIF)*.

Tabel 3

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Penerimaan PPnBM (X1)	,562	1,780
	Data Nilai Tukar Rupiah (X2)	,562	1,780

a. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan (Y)

Sumber: Output SPSS 20

Dari output di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam data.

3.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji statistik Durbin Watson, yaitu dengan membandingkan angka Durbin-Watson hitung (DW) dengan nilai kritisnya (dL dan dU)

Kriteria pengambilan kesimpulan :

- Jika $DW < dL$ atau $DW > 4 - dL$, maka terdapat autokorelasi.
- Jika $dU < DW < 4 - dU$, maka tidak terdapat autokorelasi.
- Jika $dL \leq DW \leq dU$ atau $4 - dU \leq DW \leq 4 - dL$, uji Durbin Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (*inconclusive*).

Dengan ukuran sample $n = 67$, $\alpha = 0,05$ dan banyaknya variabel independen

$k = 2$, didapat nilai kritis $dL = 1,5433$ dan $dU = 1,6660$.

Hasil pengujian autokorelasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2,003

b. Dependent Variable : Realisasi Penerimaan Pajak (Y)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,784. Karena nilai DW berada di antara $dU (1,6660) < DW (2,003) < 4 - dU (2,334)$, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

3.2.4 Uji heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas.

Tabel 5

Correlations

			Unstandardized Residual
Spearmans rho	Penerimaan PPnBM (X1)	Correlation Coef ficient	-,008
		Sig. (2-tailed)	,950
		N	67
	Data Nilai Tukar Rupiah (X2)	Correlation Coef ficient	,124
		Sig. (2-tailed)	,317
		N	67

Dari output di atas, dapat dilihat bahwa terdapat korelasi yang tidak signifikan. Hal ini dilihat dari nilai p-value (Sig) yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

3.3 Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan pengujian metode yang telah dilakukan, maka hasil dari pengujian regresi berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,680 ^a	,463	,446	,18310

a. Predictors: (Constant), Data Nilai Tukar Rupiah (X2), Penerimaan PPnBM (X1)

Sumber: Output SPSS.20

Berdasarkan hasil output *software SPSS* di tabel 6, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,680. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang antara Penerimaan PPnBM (X_1) dan Data Nilai Tukar Rupiah (X_2) terhadap Realisasi Penerimaan (Y).

3.3.1 Analisis pengaruh parsial

Tabel 7

Variabel	Standardized Coefficients	Correlations	Besarnya Pengaruh Secara Parsial	Besarnya Pengaruh Secara Parsial (%)
	Beta	Zero-order		
X_1	0,14	0,512	0,07	7,16%
X_2	0,969	0,675	0,65	65,41%
Pengaruh Total			0,72	72,57%

Pengaruh parsial diperoleh dengan mengalikan *standardized coefficient beta* dengan *zero-order*. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa besarnya pengaruh Penerimaan PPnBM (X_1) terhadap Realisasi Penerimaan (Y) secara parsial adalah sebesar 7,16%, besarnya pengaruh Data Nilai Tukar Rupiah (X_2) terhadap Realisasi Penerimaan (Y) secara parsial adalah sebesar 65,417%. Jadi, total keseluruhan pengaruh Penerimaan PPnBM (X_1) dan Data Nilai Tukar Rupiah (X_2) terhadap Realisasi Penerimaan (Y) secara bersama-sama adalah sebesar 72,57%. Hal ini pun dapat terlihat dari nilai koefisien determinasinya.

3.3.2 Uji Simultan (Uji F)

F hitung	Df	F tabel	Sig	Keterangan	Kesimpulan
27,542	df1 = 2	3,138	0,000	Ho ditolak	Ada pengaruh
	df2 = 64				(Signifikan)

Dari tabel diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar 15,389. Karena nilai F hitung (27,542) > F tabel (3,138), maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari Penerimaan PPnBM (X_1) dan Data Nilai Tukar Rupiah (X_2) terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (Y).

3.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa Besarnya pengaruh Penerimaan PPnBM (X_1) dan Data Nilai Tukar Rupiah (X_2) terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (Y) dapat ditunjukkan oleh koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} KD &= R^2 \times 100\% \\ &= (0,680)^2 \times 100\% \\ &= 46,24\% \end{aligned}$$

Artinya variabel Penerimaan PPnBM (X_1) dan Data Nilai Tukar Rupiah (X_2) memberikan pengaruh sebesar 46,24% terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (Y). Sedangkan sisanya sebesar 53,76% merupakan kontribusi variabel lain selain Penerimaan PPnBM (X_1) dan Data Nilai Tukar Rupiah (X_2).

3.3.4 Uji Parsial (Uji t)

1. Pengaruh PPnBM terhadap Penerimaan Pajak

Tabel 8

Variabel	t hitung	Df	t table	Sig	Keterangan	Kesimpulan
X1	0,947	64	1,997	0,347	Ho diterima	Tidak Signifikan

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa Variabel X_1 memiliki nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} . Karena nilai t_{hitung} (0,947) < t_{tabel} (1,997), maka Ho diterima. Namun dapat disimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan dari Penerimaan PPnBM (X_1) terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (Y). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jones E Ihendiniho (2015), Entera Velaj, Msc (2014) yang menyatakan bahwa pajak penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

2. Pengaruh Nilai tukar Rupiah terhadap penerimaan pajak

Tabel 9

Variabel	t hitung	Df	t table	Sig	Keterangan	Kesimpulan
X2	4,891	64	1,997	0,000	Ho ditolak	Signifikan

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa Variabel X_2 memiliki nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Karena nilai t hitung (4,891) > t tabel (1,997), maka Ho ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari Data Nilai Tukar Rupiah (X_2)

terhadap Realisasi Penerimaan (Y). Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Muhammd Arifin (2015), Timbul Hamonang (2012) dan Wahyu Kartika (2010) yang menyatakan bahwa melemah atau menguatnya nilai tukar rupiah akan berpengaruh pada penerimaan pajak.

Variabel	Koefisien Regresi	Std. Error	T	Sig.
(Constant)	17,748	1,653	10,739	0,000
X1	0,014	0,015	0,947	0,347
X2	0,969	0,198	4,891	0,000

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 17,748 + 0,014 X_1 + 0,969 X_2$$

Nilai koefisien regresi pada variabel-variabel bebasnya menggambarkan apabila diperkirakan variabel bebasnya naik sebesar satu unit dan nilai variabel bebas lainnya diperkirakan konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel terikat diperkirakan bisa naik atau bisa turun sesuai dengan tanda koefisien regresi variabel bebasnya. Dari persamaan regresi linier berganda di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 17,748. Artinya, jika variabel Realisasi Penerimaan Pajak (Y) tidak dipengaruhi oleh kedua variabel bebasnya yaitu Penerimaan PPnBM (X_1) dan Data Nilai Tukar Rupiah (X_2) bernilai nol, maka besarnya rata-rata Realisasi Penerimaan akan bernilai 17,748

Tanda koefisien regresi variabel bebas menunjukkan arah hubungan dari variabel yang bersangkutan dengan Realisasi Penerimaan. Koefisien regresi untuk variabel bebas X_1 bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Penerimaan PPnBM (X_1) dengan Realisasi Penerimaan (Y). Koefisien regresi variabel X_1 sebesar 0,014 mengandung arti untuk setiap pertambahan Penerimaan PPnBM (X_1) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Realisasi Penerimaan Pajak (Y) sebesar 0,014.

Koefisien regresi untuk variabel bebas X_2 bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Data Nilai Tukar Rupiah (X_2) dengan Realisasi Penerimaan Pajak (Y). Koefisien regresi variabel X_2 sebesar 0,969 mengandung arti untuk setiap pertambahan Data Nilai Tukar Rupiah (X_2) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Realisasi Penerimaan (Y) sebesar 0,969.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Nilai tukar rupiah berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak. Secara parsial variabel PPnBM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Bandung raun 2010-2015, sedangkan nilai tukar rupiah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Bandung tahun 2010-2015.

Daftar Pustaka

- [1] Arifin Muhammad, (2015). Pengaruh Inflasi, Ketimpangan Pendapatan, Nilai Tukar Rupiah pada penerimaan pajak. *Jurnal Ekonomi Vol. VIII ISSN: 1978-3612 (Maret, 2015)*.
- [2] Asfia Murni (2006). *Ekonomika Makro*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [3] Damayanti Sari (2013). Filosofi PPnBM Ditinjau dari Aspek Pengendalian Pola Konsumsi Masyarakat. Widya Citra Sejahtera. *Jurnal Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi (2013)*.
- [4] Direktorat Jenderal Pajak. 2015. Penurunan Penerimaan Pajak. Diakses dari www.pajak.go.id pada tanggal 1 november 2015
- [5] Fajar (2015). Rupiah Melemah Apa Pantas Khawatir?. jurnalFebUI (online). <http://bemfebui.com/official/wp-content/uploads/2015/08/BEM-FEB-UI-Rupiah-Melemah-Apa-Pantas-Khawatir.pdf> (diakses tanggal 28 desember 2015).
- [6] Indiniho E Jones (2015). Total Revenue & Economic Growth in Nigeria: Empirical Evidence. *Journal of emerging trends in economics and management sciences (JETEMS) vol 6(1): 40-46*
- [7] Kementerian Keuangan 2014. Perkembangan Penerimaan Pajak dan Penerimaan Pajak Indonesia. Diakses dari www.kemenkeu.go.id tanggal 1 november 2015
- [8] Nasikhudin (2015). Pentingnya Mengubah Basis Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal Indonesian Tax Review Vol VIII/Edisi 11/2015*

- [9]Peraturan Menteri keuangan. PMK 130/011/2013 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- [10]Prof.Dr Rochmat Soemitro, S.H.(2007).*Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung:Eresco
- [11]Resmi, Siti , (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*(buku 1 edisi 4)Jakarta:Salemba Empat
- [12]Salvatore, Dominics(2009).*Managerial Economics, dalam Perekonomian Global*.Edisi Keempat (jilid11).Jakarta:Erlangga
- [13]Sekaran, Uma. (2007). *Research Methods For Business*. (Jilid Pertama). Jakarta: Salemba Empat
- [14]Sukardji, Untung.(2005).*Hukum Pajak*,Edisi Ketiga.Jakarta:Salemba Empat
- [15]Sukirno, Sadono, (2004). *Makroekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- [16]Tanzi,V,(1989).*the impact macroeconomics policies of the level of taxation and the fiscal balance in developingcountries*.*International Monetary Fund Staff Pappers*,36,633-656
- [17]Undang-Undang Republik Indonesia No.42 Tahun 2009. *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1983. Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.
- [18]Velaj, Entera(2014).Tax revenue determinate factors the case of albania.*European scitificjournal september 2014 edition volume 1*.
- [19]Waluyo(2009).*Akuntansi Pajak*.(Edisi2,Cetakan Pertama).Jakarta:Salemba Empat
- [20]Wibowo(2014).akuntansi dan Pajak.*Strategi Direktorat Jenderal Pajak* (online).
<http://wibowopajak.com/2014/01/strategi-direktorat-jenderal-pajak.html?m=1>. (diakses tanggal 11 november 2015)
- [21]Wijayanti k Wahyu(2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi total penerimaan pajak.*E-Jurnal Fakultas Ekonomi Trisakti*Vol 7(mar 2015)
- [22] Yustinus Prastowo,2015.Panduan lengkap Pajak.Jakarta:Raih asa sukses
- [23] www.ortax.org (12 april 2015)